BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disajikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitan, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan merupakan *grassroots* dalam struktur penyelenggaraan pendidikan atau sistem pendidikan.[1] Abdurrahman an-Nahlawi memandang lembaga pendidikan sebagai salah satu sarana pendidikan Islam yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan mengembangkan kecerdasan berpikir, memperbaiki tingkah laku, dan menjadi media bermasyarakat atau berperilaku sosial dengan tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah SWT.[2]

Pada satu sisi, tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan masyarakat yang beradab.[3] Majid 'Irsan al-Kilani berpendapat bahwa visi dan misi pendidikan Islam adalah pembentukan individu yang saleh.[4] Pembentukan individu yang saleh dimulai dari mengembangkan potensi anak sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang pandai,

[1] Abdul Muin, Halim Halim, dan Aang Kunaifi, *Manajemen Pendidikan (Good Governance dalam Lembaga Pendidikan) Teori, Strategi, dan Riset Implementasi* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), h. 1.

[2] Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushûl al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asâlibiha fî al-Baiti wa al-Madrasati wa al-Mujtama'*, Cetakan ke-26 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 122.

[3] Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 141-144.

[4] Majid Irsan al Kilani, *Ahdaf al-Tarbiyah al-Islamiyyah* (Virginia: The International Institute of Islamic Tought, 1988), h. 45.

terampil dan berakhlak mulia. Hasil pendidikan itulah yang diharapkan dapat membentuk masyarakat.

Pada sisi yang lain masyarakat semakin berkembang dan mulai dipenuhi oleh berbagai tuntutan yang harus dipenuhi secara cepat dan efektif oleh lembaga pendidikan.[5] Lembaga pendidikan Islam ditantang menghadapi krisis (*`azmah*) dengan memanfaatkan kemampuan, sumber daya, dan berbagai hasil penelitian ilmiah. Pengelola lembaga pendidikan Islam memerlukan pandangan yang lebih luas dengan tidak membatasi konsep amal shalih pada bidang ibadah.[6] Untuk itu diperlukan rancangan pendidikan yang dapat memenuhi tantangan-tantangan (*tahaddiyât*), mandiri, dan terbuka.[7] Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2:148:

وَ لكُل وّجهة هُوَ مولّيها فاَسْتَبقُوْا ٱلخَيْرَات قلى اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْت بكُمُ اللهُ جميعا قالى انّ الله على كل شيء قدير

Anwar al-Baz dalam *al-Tafsîr al-Tarbawî*nya menerangkan bahwa ayat tersebut menyuruh umat Islam menjauhi sikap keras kepala dan agar berlomba-lomba serta bersaing di dalam melaksanakan ketaatan.[8] Ketaatan yang dimaksudkan tidak terbatas pada hal ibadah saja, melainkan dalam hal kebaikan, termasuk pendidikan.

---

[5] David Middlewood, "Strategic Management in Education: An Overview dalam David Middlewood and Jacky Lumby (*et al*. Eds), *Strategic Management in Schools and Colleges* (Los Angeles ; London : Sage, 2010), h. 2.

[6] Majid Irsan al Kilani, *Ahdaf al-Tarbiyah al-Islamiyyah*…, h. 146.

[7] Majid Irsan al-Kilani, *Al-Tarbiyah wa al-Tajdîd*, Cetakan ke-1 (UEA: Dar al-Qalam, 2005), h. 103.

[8] Anwar al-Badz, *Al-Tafsîr al-Tarbawî Li al-Qurân al-Karîm* (Kairo: Dâr al-nasyr li al-Jâmi'ât, 2007), h. 69.

Pendidikan beralih dari pelayanan publik yang didorong oleh profesional menuju layanan yang didorong oleh pasar. Dengan demikian, kebutuhan terhadap pendidikan yang mulanya dipahami sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan sekarang telah berubah menjadi sarana mendapatkan pekerjaan, karir, dan sebagainya. Abdurrahman an-Nahlawi menuliskan dalam bukunya *Ushûl Al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asâlibiha fî al-Baiti wa al-Madrasati wa al-Mujtama'* sebagai berikut:

الأسباب التي دعت إلى وجود المدرسة الحديثة بهذا الشكل الذي نراه اليوم ، يرجع معظمها إلى تغير نظام الحياة السياسية ا

Berdasarkan referensi tersebut, bahwa sebab yang melatarbelakangi lahirnya sekolah-sekolah modern (dalam negara Islam) yaitu adanya perubahan dalam sistem kehidupan dan politik dalam negara tersebut dan juga berkaitan dengan hubungan antara negara dengan negara lainnya.[9] Ekspektasi masyarakat yang berubah, kebijakan baru, dan teknologi menciptakan tantangan baru bagi organisasi pendidikan.[10] Sementara Arief Subhan menambahkan perjumpaan budaya (*cultural encounter*) antara Islam dan modernisasi sebagai yang mempengaruhi perkembangan lembaga pendidikan Islam.[11]

Pendidikan Islam dianggap sebagai bentuk pendidikan "*outmoded*" dan kurikulum yang ada pada sekolah islam itu tidak relevan dengan kondisi sekarang.

---

[9] Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushûl Al-Tarbiyah al-Islamiyyah* …, h. 120.

[10] Patricia J Gumport and Barbara Sporn, "Institutional Adaptation: Demands for Management Reform and University Administration," in *Higher Education: Handbook of Theory and Research* (Springer, 1999), 103–145.

[11] Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad Ke-20: Pergumulan antara Modernitas dan Identitas* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 6.

Pendidikan Islam semakin dihadapkan pada berbagai tantangan di antaranya tuntutan membangun literasi, membekali siswa dengan keterampilan hidup yang dibutuhkan pada masa sekarang, dan perbaikan proses belajar mengajar serta tantangan untuk senantiasa konsisten dalam melaksanakan pendidikan nilai.[12]

Azyumardi Azra mengemukan tentang pengarusutamaan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional Indonesia.[13] Menurutnya, masyarakat mengharapkan adanya kesetaraan madrasah dengan sekolah umum. Kesetaraan yang dimaksudkan adalah anak-anak mereka dapat melanjutkan ke sekolah umum setelah dari madrasah, atau selesai dari madrasah aliyah, anak-anak mereka dapat melanjutkan ke perguruan tinggi umum.

Pengarusutamaan pendidikan Islam dimulai ketika Menteri Agama Prof. Abdul Mukti Ali (11 September 1971 – 29 Maret 1978).[14] Pada masa beliau, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri merupakan hasil kesepakatan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu akibat dari SKB tersebut adalah perubahan kurikulum madrasah dari 100% agama menjadi 70% umum dan 30% agama.[15] Perubahan ini membuka jalan bagi penyetaraan madrasah dengan sekolah umum, yang pada akhirnya ditetapkan dalam UU sisdiknas tahun 1989, yang kemudian direvisi pada

---

[12] Sa'eda Buang dan Phyllis Ghim-Lian Chew, *Muslim Education In The 21st Century: Asian Perspectives* (New Delhi: Routledge, 2014), h. 4.

[13] Asrori S. Karni, *Etos Studi Kaum Santri: Wajah Baru Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Mizan Publika, 2009), h. xvi.

[14] Menteri Agama RI 11 September 1971 – 29 Maret 1978 dalam Kabinet Pembangunan II pada masa Presiden Soeharto. Beliau lahir pada tahun 1923, dan meninggal pada tahun 2004.

[15] Lihat SKB Tiga Menteri Tahun 1975 Bab I Pasal 1

tahun 2003, transformasi inilah yang disebut oleh Azymardi Azra dengan pengarusutamaan pendidikan Islam.

Pengarusutamaan pendidikan Islam terus berlanjut dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang pesantren salafiyah. Pesantren salafiyah telah memperoleh penyetaraan melalui surat keputusan bersama (SKB) 2 menteri yaitu Menag dan Mendiknas (sekarang Menag dan Mendikbud) No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000, tertanggal 30 Maret 2000, yang memberikan kesempatan kepada pesantren salafiyah untuk ikut menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan Program Wajib Belajar. Persyaratan tambahan yang harus dienuhi ialah memasukkan beberapa mata pelajaran umum dalam kurikulumnya.[16]

UU sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 menegaskan kedudukan Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini merupakan tantangan dan peluang pendidikan pesantren dan madrasah untuk bangkit, berbenah, meningkatkan mutu dan kualitasnya, serta lebih mengenalkan keunggulan dirinya di tengah-tengah masyarakat.[17] Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan undang-undang tersebut, pada 3 hal. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai lembaga; *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; *Ketiga*,

[16] Surat keputusan bersama (SKB) No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tersebut memiliki implikasi yang besar untuk perubahan. Perubahan tersebut dilakukan agar pesantren dapat memenuhi ketentuan sebagai pelaksana wajib belajar pendidikan dasar. SKB itu juga mendorong pondok pesantren yang bertipe salafiyah harus menyesuaikan diri khususnya pada kurikulumnya untuk menjaga eksistensi dan perannya dalam kancah pendidikan Nasional.

[17] Imam Machali dkk, *The Handbook of Education Management: Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia Edisi 2* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 289.

pendidikan Islam sebagai nilai.[18] Lembaga pendidikan madrasah, pesantren diniyah, dan Raudhatul Athfal juga diakui sebagai lembaga pendidikan Islam yang setara dengan sekolah.

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia mendapatkan tantangan yang lebih lagi dengan diberlakukannya PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan arah pengembangan pendidikan pesantren dan madrasah bahwa pengelolaan pesantren dan madrasah tidak bisa ditangani dengan setengah-setengah, tetapi memerlukan pemikiran pengembangan yang utuh sebagai konsekuensi dari identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam, dan pelaksanaan serta pengelolaannya memiliki standar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan .

Tuntutan inovasi selanjutnya pada lembaga pendidikan Islam dengan diberlakukannya PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan berlakunya PP tersebut, pendidikan agama dan keagamaan dipandang setara dengan pendidikan formal pada umumnya. Pendidikan agama dan keagamaan berhak mendapatkan bantuan keuangan dan fasilitas pendidikan.

Lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan, baik standarisasi pendidikan yang berlaku, maupun tantangan untuk menghasilkan ahli agama. Untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu agama, sekaligus inovatif dan adaftif terhadap tantangan, diperlukan sarana prasarana

---

[18] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 7.

pembelajaran seperti misalnya dalam hal teknologi informasi, internet, analisis *big data* dan komputerisasi. Lembaga pendidikan yang menyediakan infrastruktur pembelajaran tersebut diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan menjawab tantangan bidang teknologi tersebut.[19]

Tantangan bagi pesantren dan pendidikan diniyah dengan hadirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. PMA ini memperkuat legalitas para santri yang mengenyam pendidikan nonformal di pondok pesantren. Implikasinya terhadap strategi pengembangan pesantren, seperti adanya Madrasah Diniyah Formal. Dengan demikian, eksistensi pesantren salafiyah diperkokoh, dan pengembangan varian pesantren terbuka lebar.

Undang-undang yayasan yang diberlakukan oleh pemerintah berdampak juga pada penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan terutama dalam konteks ini madrasah (swasta) dan pesantren oleh masyarakat harus berbentuk yayasan.[20] Penyelenggaraan pendiidkan oleh masyarakat dan memungut dana dari masyarakat itu wajib berbentuk badan hukum karena menyangkut akuntabilitas dan

[19] Ahmad Sabri, *Pendidikan Islam Menyongsong Era Industri 4.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 36.

[20] UU no. 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU no 28 tahun 2004 tentang perubahan atas UU no. 16 Tahun 2001 tentang yayasan (UU Yayasan) dan PP nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan UU Yayasan. UU yayasan mengatur bahwa yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan harus didirikan dengan akta notaris. UU Yayasan yang mewajibkan yayasan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 3 tahun untuk yayasan yang telah mendapatkan status badan hukum dan satu tahun bagi yayasan yang belum memperoleh status badan hukum.

liabilitas pengelola.[21] Hal tersebut diperlukan untuk menjaga legalitas termasuk legalitas ijazah, sebagai bentuk tuntutan pemerintah yang harus dipenuhi.

Lembaga pendidikan Islam harus mampu memberikan pembuktian kepada masyarakat jika tidak mau ditinggalkan. Sekolah harus berakar pada masyarakat, yaitu dengan selalu memperhatikan ide-ide masyarakat, melaksanakan aspirasi serta mampu menumbuhkan kepercayaan kepada lembaga sekolah yang bersangkutan.[22] Pendapat yang baik dari masyarakat dapat memengaruhi kualitas hubungan masyarakat itu sendiri dengan sekolah dan dapat menciptakan pemahaman yang baik tentang sekolah itu di masyarakat.[23]

Persepsi positif merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh suatu lembaga, termasuk lembaga sekolah. Persepsi positif tentunya akan berkaitan dengan eksistensi suatu lembaga. Hal ini karena adanya penilaian yang positif akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu sekolah untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.[24] Persepsi baik terhadap lembaga dapat menarik sejumlah calon siswa. Persepsi baik dapat diperoleh salah satunya dengan cara memenuhi kebutuhan

[21] Asrori S. Karni, Etos studi kaum santri: wajah baru pendidikan Islam (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), h. 189.
[22] Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 3.
[23] Husnul Yaqin, *Kapita Selekta: Administrasi Dan Manajamen Pendidikan* (Banjarmasin: IAIN Antasari press Banjar-masin, 2011). h. 106
[24] Maskur, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 1.

dan harapan para pengguna jasa pendidikan dengan produk dan layanan yang ada di sekolah/madrasah tersebut.[25]

Sekolah membutuhkan masyarakat untuk mempertahankan eksistensi lembaga sekolah itu sendiri. Peran masyarakat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna layanan lembaga pendidikan. Tetapi masyarakat juga membutuhkan sekolah untuk mendidik anaknya.[26] Dari situ nampak adanya simbiosis antara sekolah dan masyarakat. Yang menimbulkan potensi pertukaran nilai dan manfaat antara sekolah dan masyarakat. Kegagalan sebuah organisasi dalam konteks ini lembaga pendidikan atau sekolah sering disebabkan oleh dangkalnya hubungan atau bahkan tidak adanya hubungan yang tercipta secara berencana dan sistematis dengan lingkungan.[27] Perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan dan di masyarakat pada umumnya mengharuskan sekolah berintegrasi dan membuka diri dengan lingkungan.[28]

Sekolah-sekolah yang ditutup bisa diduga karena kalah bersaing dalam mewujudkan sekolah yang menarik bagi masyarakat sekitarnya. Sebaliknya, bila sekolah mampu menjawab tantangan zaman dengan terus meng*update* sistem maupun konten pembelajarannya, termasuk juga manejemen sekolahnya, walaupun sekolah tersebut berada di tempat terpencil sekalipun akan tetap dicari.

---

[25] Muhaimin, *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah)*. h. 99

[26] Lihat UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003 Pasal 51 ayat 3. Lihat Juga Husnul Yaqin, *Administrasi dan Manajamen Pendidikan* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2011). h. 104. Lihat juga Manajemen Humas Pendidikan Islam, h. 2.

[27] Husnul Yaqin, *Administrasi dan Manajamen Pendidikan* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2011), h. 101.

[28] Husnul Yaqin, *Administrasi dan Manajamen* …, h. 102.

Pesantren sebagian besar berada di pedesaan, sedangkan madrasah dan sekolah Islam biasa ditemukan di daerah perkotaan, namun perbedaan utama di antara lembaga pendidikan tersebut bukanlah terletak pada kota/desa atau daerah, tetapi lebih pada filosofi dan kurikulum pendidikannya.[29] Beragamnya tipe lembaga pendidikan Islam berkaitan dengan konstruksi pengetahuan Islam, dan saleh seperti apa yang dikehendaki. Hal tersebut menyedikan beragam pilihan bagi orang tua khususnya bagi siswa generasi milenial.[30] Masyarakat cenderung mengharapkan anaknya diberikan pendidikan agama Islam di sekolah. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan budaya sekolah yang mendukung pengamalan agama Islam, khususnya soal pakaian seragam sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya sekolah dapat mempengaruhi persepsi orang terhadap sekolah tersebut terkait dengan citra dan identitas lembaga.[31]

Pengelolaan lembaga pendidikan lebih banyak diserahkan kepada sekolah masing-masing. Pengelolaan lembaga pendidikan membutuhkan kemampuan kepala sekolah/madrasah sebagai manajer dalam mengelola lembaga pendidikan. Oleh karena itu, terdapat kaitan yang erat antara fungsi pemasaran dengan kepemimpinan sekolah. Kepemimpinan dalam pendidikan memiliki 3 peran, yaitu sebagai CEO, cendikiawan, dan pemimpin politik. Pemimpin lembaga pendidikan sebagai

---

[29] Charlene Tan, "Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia," *Journal of Arabic and Islamic Studies* 14 (2014): 47–62.

[30] Noorhaidi Hasan, "Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi," *N. Hasan (Ed.)* (2018): 1–27.

[31] Charles Dennis et al., "The Role of Brand Attachment Strength in Higher Education," *Journal of Business Research* 69, No. 8 (2016): 3049–3057.

pemimpin politik memiliki kemampuan bernegosiasi, melobi, dan menunjukkan kekuasaan untuk menguatkan perkembangan lembaganya.[32]

Pemimpin sekolah hendaknya memiliki berbagai keterampilan dan cara-cara yang strategis untuk mengembangkan berbagai sumber daya, mengintegrasikan berbagai jadwal, menentukan sasaran komunikasi, mengontrol berbagai persepsi, memengaruhi harapan, dan membuat presentasi.[33] Kepala sekolah yang dapat mengadopsi perhitungan sistem pasar dan pandai melihat peluang.[34] Kepala sekolah diharapkan muncul sebagai pemimpin dengan visi yang jelas untuk sekolah mereka, untuk membuat sekolah menjadi kompetitif dalam ranah pilihan sekolah.[35] Beberapa strategi yang digunakan para pemimpin sekolah seperti memperluas program ekstrakurikuler, strategi pemasaran, dan menyaring siswa.[36]

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama yang baik menyebabkan pendidikan murah atau bahkan gratis tidak lagi sebagai jaminan bagi suatu yayasan atau lembaga pendidikan akan menjadi pilihan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan. Masyarakat lebih memilih lembaga pendidikan yang mahal tetapi memuaskan dibandingkan dengan

---

[32] Ferry Doringin And Kristianus Oktriono, "Political Aspects in Educational Leadership: A Case Study In ASEAN Economic Community Era," *Humaniora* 8, No. 4 (2017): 303–309.

[33] Muhaimin et al, *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah / Madrasah)*. h. 99

[34] Amanda Keddie, "School Autonomy, Accountability and Collaboration: A Critical Review," *Journal Of Educational Administration and History* 47, No. 1 (January 2, 2015): 1–17.

[35] Maria Granvik Saminathen et al., "Effective Schools, School Segregation, and The Link With School Achievement," *School Effectiveness and School Improvement* 29, No. 3 (July 3, 2018): 464–84.

[36] Huriya Jabbar, "'Every Kid is Money': Market-Like Competition and School Leader Strategies In New Orleans," *Educational Evaluation And Policy Analysis* 37, No. 4 (December 1, 2015): 638–59.

lembaga pendidikan yang gratis tetapi dikelola asal-asalan. Oleh karena itu, perubahan pandangan masyarakat tersebut juga harus diperhatikan oleh pengelola lembaga pendidikan sehingga layanan pendidikan yang ditawarkan dapat diterima dan menjadi pilihan.

Ada lembaga pendidikan yang dapat bertahan dan ada yang tidak. Lembaga pendidikan yang dapat menjawab tantangannya pasti akan bertahan. Restrukturisasi organisasi pendidikan dapat menjadi respon yang inovatif, karena struktur organisasi yang tepat diperlukan untuk menghadapi perubahan lingkungan, mempromosikan, dan membangun serta membuat inovasi yang dalam struktur yang lebih fleksibel dengan aturan dan prosedur yang baru.[37]

Pada tahun 2004/2005 jumlah pondok pesantren di Kalimantan Selatan yaitu 206 buah, dan pada tahun 2006/2007 bertambah menjadi 234 buah. Selanjutnya pada tahun 2019/2020 bertambah menjadi 260 buah.[38] Jika dilihat dari jumlah tersebut, pesantren di Kabupaten Tabalong tergolong masih sedikit, yakni ada 10 buah pesantren yang terdaftar di Kemenag dengan jumlah santri 1941 Orang. Jumlah santri tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah santri di kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tanah Bumbu, 26 buah pesantren dengan jumlah santri 4. 952 orang, Kabupaten Tanah Laut 22 buah pesantren dengan jumlah santri 5.384 orang. Walaupun begitu, jumlah santri di Kabupaten Tabalong masih sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah santri di Kabupaten Balangan yang sama-sama

[37] Tuncer Fidan And Ali Balcı, "Managing Schools As Complex Adaptive Systems: A Strategic Perspective," *International Electronic Journal of Elementary Education* 10, no. 1 (2017): 11–26.

[38] Http://Emispendis.Kemenag.Go.Id. diakses tanggal 23 Februari 2020.

memiliki 10 buah pesantren yang terdaftar.[39] Kontestasi kemampuan santri dalam acara-acara maulid, kehadiran santri-santri pesantren di masjid-masjid, yang mengisi menjadi imam sholat lima waktu, kemudian imam sholat tarawih pada kesempatan bulan Ramadhan dengan menunjukkan kemampuan bacaan Al-Quran dan hapalan Al Quran ternyata belum cukup untuk menampilkan daya tarik pesantren di tengah masyarakat.

Berdasarkan data EMIS Pendis Kemenag, lembaga pendidikan Islam yang termasuk madrasah yaitu RA, MIS/MIN, MTs/MTsN, dan MA/MAN di Kalimantan Selatan, madrasah swasta merupakan jumlah terbanyak dengan rincian, semua RA adalah swasta sebanyak 340 buah, MIS sebanyak 390 buah, MIN sebanyak 143 buah, MTs sebanyak 261 buah, MTsN sebanyak 84 buah, MA sebanyak 118 buah, dan MAN sebanyak 42 buah.[40] Untuk jenjang MI, MTs, dan MA, setelah diperbandingkan, antara lembaga pendidikan Islam negeri dengan swasta di Kalimantan rasionya adalah 1:3. Jumlah lembaga pendidikan Islam swasta adalah 3 kali lipat dari jumlah lembaga pendidikan negeri. Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan agama masih sangat tinggi. Partisipasi masyarakat dapat menjadi faktor penentu maju dan mundurnya sebuah lembaga pendidikan.

Tren sekarang adalah sekolah umum mulai menambahkan pendidikan agama Islam yang lebih dari sekedar pendidikan agama Islam yang diwajbkan dalam

[39] Http://Emispendis.Kemenag.Go.Id. diakses tanggal 23 Februari 2020.
[40] Http://Emispendis.Kemenag.Go.Id/.diakses tanggal 23 Februari 2020.

kurikulum nasional. Sementara pesantren dan madrasah mulai memberikan pendidikan umum dan keterampilan di samping pendidikan agama Islam yang menjadi ciri khasnya. Dengan demikian, baik sekolah, pesantren, dan madrasah dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan penanaman nilai-nilai agama Islam. Kesamaan fungsi itulah yang menyebabkan pesantren, sekolah, dan madrasah dapat saling digantikan satu sama lain. Oleh karena itu, menjaga eksistensi, keberadaan dalam kontestasi sangatlah penting. Lembaga pendidikan yang ada saling menunjukkan keunggulan, tidak lagi terbatas pada keunggulan melalui prestasi, fasilitas maupun konsep pendidikan, tetapi sampai dengan mengkomunikasikan dan menyebarkan keunggulan tersebut kepada masyarakat.

Lokasi yang dipilih sebagai latar tempat penelitian ini adalah Kabupaten Tabalong, kabupaten paling utara di Kalimantan Selatan. Kabupaten ini merupakan salah satu pintu masuk ke wilayah Kalimantan Selatan karena letaknya berada di perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah, sehingga Kabupaten Tabalong disebut sebagai daerah segitiga emas.[41] Jika dilihat dari letak strategisnya tersebut, tentu sangat menarik jika lembaga pendidikan di dalam daerah tersebut diteliti dan dikaji, khususnya lembaga pendidikan Islam yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Bupati Tabalong H. Anang Syakhfiani (2014 sampai dengan sekarang) termasuk salah satu dari 6 kepala daerah di Indonesia yang

[41] Badan Pusat Statistik Tabalong, *Tabalong dalam Angka 2019* (Tabalong: BPS Tabalong, 2019).

mendapatkan penghargaan sebagai kepala daerah berprestasi dalam pendidikan Islam tahun 2015 yang diberikan oleh Dirjen Pendis Kemenag.[42]

Berdasarkan studi pendahuluan, diperoleh gambaran di lapangan ada sejumlah lembaga pendidikan Islam yang disebut oleh masyarakat dengan pesantren tak ubahnya seperti TPA/TPQ, karena fungsinya yang hanya mengajarkan baca tulis Al Qur'an, tanpa kyai, tanpa masjid, tanpa pengajian kitab kuning, dan tanpa asrama.[43] Keadaan pesantren seperti itu bagai pepatah, hidup segan mati pun tak mau,[44] ditambah lagi bahwa sebagian masyarakat mengatakan bahwa pesantren sudah "mati" tetapi dari pihak pengelola pesantren itu mengatakan kami tidak mati, kami masih ada.[45] Sebagian kecil pesantren di Kabupaten Tabalong terkesan tidak mampu mempertahankan daya tariknya dan tidak mampu menarik minat masyarakat. Narasumber dari masyarakat Tabalong mengatakan bahwa dirinya ketika memilih sekolah dulu tidak tertarik sama sekali masuk ke madrasah, ia pun mengatakan bahwa sama sekali tidak terpikirkan.[46]

---

[42] https://www.antaranews.com/berita/534847/enam-kepala-daerah-raih-penghargaan-peduli-pendidikan-islam diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.

[43] Studi dilakukan dengan cara observasi lapangan di Desa Pematang, Desa Bungin, Desa Habau di Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong pada tanggal 20 Desember 2019.

[44] Narasumber dari PP (pondok pesantren) yang keadaannya dalam kondisi memprihatinkan dengan jumlah santri sangat sedikit dan sarana prasarana yang jauh dari baik menggambarkan kondisi PP tersebut dengan istilah *lâ yamûtu wa lâ yahyâ*

[45] Sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan oleh masyarakat sebagai pesantren di Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas. Peneliti juga memeriksa pada dokumen Kemenag Tabalong dan didapatkan bahwa lembaga pendidikan tersebut memang pernah dicatat sebagai pesantren, tetapi sekarang dicatat sebagai madrasah diniyah. Narasumber dari masyarakat Tabalong wilayah Selatan mengatakan bahwa pesantren itu telah mati.

[46] Wawancara dengan Mia Ida Astuti (41 tahun) seorang ibu rumah tangga dengan suaminya seorang karyawan perusahaan tambang, masyarakat Tabalong. Mia Ida Astuti berpendidikan D3. Beliau berasal dari keluarga menengah ke atas, kedua orang tua beliau PNS, yang mana ayah beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bandara Warukin Tabalong. Beliau alumni SMP 2 Tanjung dan juga

Pesantren dan madrasah memproyeksikan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak generasi beriman, bertakwa, dan beramal sholeh, tetapi persepsi sebagian orang tua dan siswa yang lebih menilai fasilitas, sarana, suasana, dan kesempatan melanjutkan kuliah atau kesempatan kerja. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber anggota masyarakat Tabalong yang berasal dari Jogyakarta. Narasumber mengatakan bahwa baginya, anak-anaknya untuk pendidikan dasar yaitu SD dan SMP anak-anaknya masih bisa bersekolah di Tabalong, itu pun di sekolah yang sudah beliau ketahui fasilitas dan sarananya lengkap dan juga sekolah yang bersih. Beliau mengatakan kalau di madrasah itu seperti TPA saja. Kemudian untuk sekolah lanjutannya, untuk SMAnya sudah tidak bisa lagi, anak-anaknya harus sekolah keluar.[47]

Berdasarkan deskripsi persepsi masyarakat Tabalong tersebut, dapat diketahui adanya kesenjangan tentang apa yang mereka pikirkan tentang lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong, sehingga menjadi tidak mudah untuk memperoleh komitmen dari penggunanya. Oleh karenanya, pesantren

---

alumni SMA Negeri 2 Tanjung, pada tanggal 20 Maret 2020. Dalam wawancara tersebut, nara sumber mengatakan kalau dahulu Ia sama sekali tidak tertarik dengan madrasah dan pesantren. Sama sekali tidak ada dalam pikirannya terlintas untuk sekolah di madrasah atau pesantren.

[47] Hasil wawancara dengan Ibu Edi (57 tahun) masyarakat Tabalong berasal dari Jogyakarta. Beliau telah tinggal di Tabalong sekitar 20 tahun. Beliau berpendidikan S1 ekonomi (SE). Suami beliau bekerja di PT.Adaro dengan posisi jabatan yang strategis dan sekarang mengelola perusahaan sendiri. Anak beliau ada 3, dan semuanya bersekolah di Jogya ketika melanjutkan SMAnya. Selama di Tabalong anak-anaknya sekolah di SD Pertamina, SMP Plus (juga di bawah yayasan milik Pertamina), ada juga yang sekolah di SD Hasbunallah dan SMP Hasbunallah (setelah SD Hasbunallah didirikan, Ibu Edi memasukkan anaknya ke SD Hasbunallah) karena memiliki kedekatan dengan salah satu pendiri yayasan Hasbunallah.

dan madrasah harus melakukan upaya yang lebih berorientasi pada *customer* untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Gambaran di atas untuk pesantren dan madrasah. Adapun untuk sekolah, ada regulasi pemerintah mengatur untuk penerimaan siswa. Pada tahun 2018, pemerintah melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Regulasi tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah yaitu Bupati/walikota untuk menerbitkan penetapan zonasi dalam PPDB di sebuah satuan pendidikan.[48]

Pemberlakuan sistem zonasi membatasi kesempatan sekolah yang berada di bawah Kemendikbud untuk menerima siswa di luar zonasinya, demikian pula bagi warga masyarakat juga tidak memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memilih satuan pendidikan sebagai tempat belajar anaknya. Kebijakan zonasi bertujuan supaya semua sekolah menjadi sekolah favorit. Kebijakan ini juga ingin memberikan solusi bagi sekolah-sekolah yang kekurangan murid. Pada tahun 2020 Disdik Tabalong menyatakan pemberlakuan sistem zonasi pada satuan pendidikan di bawah pembinaannya.[49]

Berkenaan dengan sistem zonasi di Kabupaten Tabalong, peneliti melakukan studi pendahuluan melalui wawancara dengan kepala pembinaan SD Dinas

[48] Mohammad Thoha, *Kontroversi Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), h. 43.

[49] "Sistem Zonasi Jadi Patokan Penerimaan Siswa Baru," *TV Tabalong*, publikasi tanggal 18 Maret 2020 diakses pada tanggal 6 Februari 2022, https://tv.tabalongkab.go.id/tabalong-hari-ini/sistem-zonasi-jadi-patokan-penerimaan-siswa-baru/.

Pendidikan Kabupaten Tabalong.[50] Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Disdik Tabalong telah menerapkan sistem zonasi pada tahun 2020. Tetapi pada kenyataan di lapangan pemberlakuan sistem zonasi tidak seperti yang diharapkan,[51] Pemerintah Daerah tidak dapat memaksakan pemerataan jumlah siswa di sekolah-sekolah. Masyarakat tetap memilih sekolah yang dikehendakinya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah siswa yang tetap menumpuk pada beberapa sekolah yang banyak peminatnya. Keragaman pengalaman dan harapan *customer* terhadap sekolah pilihannya. Keadaan tersebut menciptakan situasi yang semakin kompetitif. Sekolah yang lebih menarik dan memberikan nilai lebih sesuai dengan harapan *customer* akan dipilih oleh masyarakat baik dari dalam ataupun luar zona yang ditentukan.

Dengan demikian, kontestasi dan adaptasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong menjadi isu yang sangat penting untuk dikaji. Bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat menjadi memiliki daya tarik bagi *customer* di tengah

---

[50] Hasil Wawancara dengan Bapak AR (Kasi Pembinaan SD Disdik Tabalong pada tanggal 6 Oktober 2020 di Kantor Disdik Kabupaten Tabalong. Dalam wawancara tersebut, beliau mengatakan,"Yang Zonasi itu (maksudnya sistem zonasi)… kita sebenarnya untuk melokalisasi daerah yang padat penduduknya otomatis *kan* padat pangsa pasar untuk ke sekolah itu nya misalkan untuk SD.. memang *Hasbunallah*, *Pembataan* (nama SD yang banyak siswanya)… kami tetap mewanti-wanti dengan pihak sekolah maksimal 1 rombelnya itu 35 orang. Masalahnya *tu* ke dapodik sangat berbahaya… karena sistem kan… jangan sampai peserta didik itu tidak memiliki nomor induk siswa nasional, dan kalau peserta didiknya tidak terdaftar akan dikhawatirkan tidak mendapat dana bos karena tidak terhitung dan siswa tidak mendapat nomor peserta ujian nasional. Peraturan Pemerintah ini *kan* sudah dibuat sedemikian rupa menjadi kebijakan nasional".

[51] Lihat Pasal 16 Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat," diakses pada tanggal 6 Februari 2022, https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf.

keterbatasan sumber daya yang dimilikinya, memenuhi kebutuhan *customer*, dan menjawab tuntutan *customer* diantaranya tuntutan teknologi dan tuntutan regulasi pemerintah. Berkaca dengan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan tersebut, penelitian ini bermaksud melihat kembali bagaimana lembaga pendidikan Islam dikatakan dapat *survive*, tetap eksis, dan menarik dalam persepsi masyarakat melalui upaya kontestasi dan adaptasi lembaga pendidikan Islam.

B. Fokus Penelitian

Bertolak pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Berfokus pada lembaga pendidikan Islam yang ada di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan meliputi madrasah, dan pesantren yang berada di bawah naungan Kemenag Tabalong serta sekolah umum yang berciri khas pendidikan agama Islam di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
2. Berfokus pada kontestasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi:
   a. Faktor penyebab kontestasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong
   b. Mode kontestasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong
   c. Strategi kontestasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong
   d. *Brand equity* lembaga pendidikan Islam berdasarkan sudut pandang pengguna jasa lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong sebagai hasil kontestasi

3. Berfokus pada adaptasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi:
   a. Faktor pendorong adaptasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong
   b. Mode adaptasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong
   c. Strategi adaptasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong
   d. Perubahan Persepsi Pengguna Jasa Lembaga Pendidikan terhadap Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong sebagai hasil adaptasi.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontestasi dan adaptasi lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan deskripsi lembaga pendidikan Islam berdasarkan sudut pandang pengguna jasa lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan upaya kontestasi oleh lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Untuk mendeskripsikan upaya adaptasi oleh lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap kajian Pendidikan Agama Islam, terutama dalam Pendidikan Agama Islam dalam wadah lembaga pendidikan Islam , dan pemasaran jasa pendidikan Islam sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk:

a. Menunjukkan bahwa teori kontestasi dan teori adaptasi dapat menguraikan permasalahan Pendidikan Agama Islam dalam wujud lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan.
b. Memberikan kontribusi keilmuan baru pendidikan Islam yakni dalam hal teori manajemen Pendidikan Islam berbasis manajemen *brand equity*.
c. Memberikan kontribusi dengan menghasilkan kajian lembaga pendidikan Islam dalam perspektif pemasaran pendidikan.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemegang kebijakan, dan bagi pimpinan lembaga pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Sebagai rujukan kebijakan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk membuat kebijakan mengenai lembaga-lembaga Pendidikan Islam serta menyiapkan regulasi untuk mengawasi pertumbuhan lembaga-lembaga tersebut.
b. Sebagai rujukan kebijakan pimpinan lembaga pendidikan Islam untuk menentukan arah dan tujuan pengembangan lembaga pendididkan Islam

sehingga lebih siap menghadapi kontestasi dan lebih adaptif merespon perubahan lingkungan di Kabupaten Tabalong khususnya, dan di Kalimantan Selatan pada umumnya.

c. Sebagai rujukan bagi orang tua khususnya dan masyarakat Tabalong pada umumnya untuk lebih cermat dalam menentukan pilihan lembaga pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya sekaligus dapat meningkatkan peran aktif orang tua dalam membantu kelangsungan lembaga pendidikan Islam.

d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi semua pihak yang mengambil keputusan terhadap lembaga pendidikan Islam yaitu tentang pentingnya memahami persepsi *customer*, terutama orang tua siswa dan siswa sehingga *brand equity* sebuah lembaga pendidikan Islam dilihat dari sudut pandang *customer*nya.

E. Definisi Operasional

Judul penelitian ini, yaitu "Kontestasi dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan". Berikut ini disajikan penjelasan istilah pada judul tersebut.

1. Kontestasi

Secara etimologi, kata kontestasi berasal dari bahasa Inggris *contestation*. Kamus oxford 2005 menyebutkan kata *contest* sebagai kata benda yang artinya *an event in which people complete supremacy*. Sehingga bila diterjemahkan, kontestasi adalah suatu ajang perlombaan di mana terjadinya adu kekuatan atau

keunggulan antaraktor. Dengan demikian, kontestasi secara etimologi dapat diartikan sebagai perebutan atau suatu pertarungan atau persaingan antaraktor baik individu maupun kelompok, yang masing-masing beradu strategi untuk memperjuangkan ideologi, nilai, solusi, kepentingan, dan lain sebagainya. Secara terminologi, menurut Antje Wiener, kontestasi merupakan aktivitas sosial yang tidak terbatas pada pertentangan atau perdebatan dan protes tetapi kontestasi juga tentang mengkonfirmasi keberadaan suatu komunitas dan dapat meningkatkan legitimasi.[52]

Adapun secara operasional, kontestasi lembaga pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah kontestasi dalam arti saling menunjukkan keunggulan untuk mendapatkan pengakuan keunggulan tersebut dari masyarakat. Lembaga pendidikan Islam berupaya mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran penggunanya. Lembaga pendidikan Islam berupaya menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas yang baik yang mereka miliki dengan menggunakan berbagai strategi.

Keberadaan lembaga pendidikan Islam dengan keanekaragamannya sehingga memunculkan perebutan bagaimana lembaga pendidikan Islam itu menjadi pilihan terbaik dalam persepsi masyarakat. Kontestasi dalam penelitian ini adalah menyangkut tentang manajemen *brand equity* yang seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi

[52]Antje Wiener, *A Theory of Contestation*, 1st ed., SpringerBriefs in Political Science (New York: Springer, 2014), h. viii.

Kalimantan Selatan. Upaya yang dilakukan lembaga pendidikan Islam untuk menciptakan nilai lebih, membuat *brand equity*, serta mempertahankan *brand equity*nya.

2. Adaptasi

Secara etimologi, adaptasi berasal dari bahasa latin *adaptare*, dan dalam bahasa inggris *adapt* yang berarti *adjust, fit to*…, *alignment* dalam bahasa Indonesia berarti menyesuaikan atau penyesuaian atau penyelarasan. Adaptasi juga diartikan sebagai "*making an adjustment from one situation or condition to another*"[53] yaitu membuat penyesuaian dari suatu situasi atau kondisi ke yang lain.

Secara terminologi, adaptasi adalah suatu proses pembauran dan akomodasi. Pembauran terjadi di mana pengalaman eksternal membaur ke dalam pemahaman yang sudah ada. Akomodasi terjadi apabila pengalaman eksternal yang asing itu tidak sesuai dengan pengetahuan yang ada, kemudian diakomodasikan ke dalam pikiran, sehingga mengubah organisasinya.[54]

Keller berpendapat sebaiknya pengelolaan perguruan tinggi berperilaku seperti suatu organisme yang menghidupi dirinya sendiri, bisa berubah, dan beradaptasi dengan lingkungannya, "*Colleges and universities are organizations,*

---

[53] David Jonassen et al., *Handbook of Research on Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications and Technology* (Routledge, 2008). h. 279

[54] James W. Guthrie, *Encyclopedia of Education*, 2nd ed. (Macmillan Reference USA, 2002), h. 1463. diakses tanggal 5 Desember 2020. *Adaptation is a process of assimilation and accommodation, where external events are assimilated into existing understanding, but unfamiliar event, which don't fit with existing knowledge, are accommodated into the mind, thereby changing its organization*.

and often large, complex, expensive ones at that….but to nudge it to behave like an organism that must feed it self, change, and adapt to its environment."[55] Pendapat Keller tersebut menunjukkan personifikasi lembaga pendidikan seperti suatu organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

Kim S. Cameron merupakan orang pertama yang menjelaskan tentang adaptasi lembaga pendidikan tinggi. Ia menjelaskan bahwa adaptasi organisasi merujuk pada proses modifikasi dan perubahan dalam organisasi atau komponen-komponennya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal dengan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan. Adaptasi tidak hanya menunggu lingkungan untuk berubah dan kemudian organisasi bereaksi terhadapnya, karena adaptasi proaktif atau antisipatif juga mungkin terjadi.[56] Ada beberapa ahli yang membahas tentang adaptasi dalam konteks lembaga pendidikan, di antaranya Kim S. Cameron yang kemudian diikuti oleh Barbara Sporn, dan Gumport. Barbara Sporn menggambarkan model adaptasi lembaga pendidikan tinggi dimulai dari input yang terdiri atas perubahan kondisi baik itu kondisi eksternal maupun kondisi internal disebabkan misalnya oleh reformasi struktural, krisis keuangan, dan keragaman budaya. Krisis tersebut memicu proses adaptasi yang terwujud dalam tindakan pengelolaan, manajemen, dan kepemimpinan. Hasilnya adalah perubahan strategi, struktur, dan budaya

[55] George Keller, *Academic Strategy: The Management Revolution in American Higher Education* (London: JHU Press, 1983), h. 174.

[56] Kim S. Cameron, "Organizational Adaptation and Higher Education," *The Journal of Higher Education* 55, no. 2 (1984), h. 123. *Organizational adaptation refers to process modification and alterations in the organization or its components in order to adjust to changes in the external environment.*

universitas.[57] Barbara Sporn selanjutnya mengatakan bahwa adaptasi didorong oleh keterbatasan sumber daya, tekanan pasar, teknologi informatika, dan peraturan pemerintah.[58] Berkenaan dengan *brand equity* isu adaptasi menjelaskan tentang *brand* yang perlu menyesuaikan aspek-aspek spesifik dari *mix marketing* agar *brand* menjadi lebih menarik bagi kondisi pasar setempat.[59]

Secara operasional, adaptasi yang dimaksudkan oleh penelitian ini adalah perubahan pada lembaga pendidikan Islam sebagai konsekuensi dari adanya kontestasi yang disebutkan sebelumnya. Agar mempertahankan *brand equity* yang telah didapatkan dan dibangun dengan susah payah dan dengan waktu yang lama, agar tidak ditinggalkan oleh *customer*nya, untuk itu lembaga pendidikan melakukan perubahan. Perubahan tersebut meliputi perubahan dalam bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan, keinginan, dan tuntutan *customer*. *Pertama*, kebutuhan, keinginan, dan tuntutan *customer* terhadap lembaga pendidikan Islam untuk memberikan ijazah agar dapat melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan. *Kedua*, tuntutan peraturan pemerintah. *Ketiga*, tuntutan perkembangan teknologi dan informasi.

---

[57] Barbara Sporn, "Adaptation Processes at Universities: Organizational Implications of a Complex Environment," *Tertiary Education and Management* 1, no. 1 (January 1, 1995): 72–75, accessed June 20, 2021, https://doi.org/10.1080/13583883.1995.9966859.

[58] Barbara Sporn, *Adaptive University Structures: An Analysis of Adaptation to Socioeconomic Environments of US and European Universities* (London: J. Kingsley Publishers, 1999). H. 17.

[59] Kevin Lane Keller and Vanitha Swaminathan, *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*, 5th ed. (USA: Pearson Education, 2020), h. 532.

3. Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Secara operasional, lembaga pendidikan Islam dalam penelitian ini meliputi pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Penelitian ini terbatas pada lembaga pendidikan Islam tingkat pendidikan dasar sampai prauniversitas mulai dari MI/sederajat, MTs/sederajat, dan MA/sederajat. Sehingga jenjang perguruan tinggi dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tidak termasuk dalam kajian penelitian ini.

Lembaga pendidikan Islam *indigenous* di Indonesia, pesantren (Islamic Boarding School).[60] Ada beberapa jenis pesantren menurut Manfred Ziemek, yaitu tipe A, B, C, D, dan E.[61] Sebagian dari tipe pesantren yang disebutkan itu ada ditemukan di Kabupaten Tabalong. Adapun pesantren yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren di Kabupaten Tabalong. Tipe apapun pesantren itu. Dalam penelitian ini, pesantren merepresentasikan lembaga pendidikan Islam nonformal. Pesantren di Kabupaten Tabalong tidak semuanya memiliki elemen-elemen yang lengkap,[62] bahkan ada lembaga pendidikan yang diberikan nama "Pesantren" oleh masyarakat desa di

[60] Hefner menggunakan istilah Islamic Boarding School untuk menyebut pesantren, lihat Robert W. Hefner, ed., *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia* (USA: University of Hawaii Press, 2009), h. 4.

[61] Manfred Ziemek, terj. oleh Burke, *Pesantren dalam perubahan sosial* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986).

[62] Dhofier menjelaskan bahwa elemen pesantren itu ada 5 yaitu kyai, santri, pondok, masjid, dan kitab kuning, lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi pesantren: studi tentang pandangan hidup kyai* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1980).

mana lembaga itu didirikan tetapi pada kenyataannya tidak memenuhi persyaratan sebagai pesantren. Pesantren yang fungsinya seperti TK al-Qur'an. Dalam penelitian ini, pesantren itu juga ikut dideskripsikan, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontestasi dan adaptasi pesantren di Kabupaten Tabalong.

Madrasah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lembaga pendidikan formal, sekolah umum yang berciri khas pendidikan agama Islam, Adapun Arief Subhan menyebut madrasah sebagai "lembaga pendidikan agama plus"[63] yang berada di bawah naungan Kemenag. Penelitian ini berfokus pada madrasah negeri tingkat dasar yaitu madrasah tsanawiyah negeri.

Arief Subhan menggunakan istilah sekolah Islam (*Islamic School*) untuk merujuk sekolah modern dengan latar belakang kemunculannya disebabkan oleh kebangkitan muslim kelas menengah perkotaan yang menginginkan pendidikan umum dan pendidikan agama yang berkualitas sesuai kebutuhan mereka (sekolah umum plus).[64] Adapun Sekolah Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini merujuk pada sekolah umum yang berciri khas pendidikan agama Islam tetapi berada di bawah Kemendikbud.

[63] Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam* …, h. 6.
[64] Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam* ..., h. 150-151.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan publikasi tentang lembaga pendidikan Islam telah banyak dilakukan. Berikut ini disajikan penelitian dan publikasi tentang lembaga pendidikan Islam yang relevan dengan penelitian Kontestasi dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. *Pertama*, penelitian dan publikasi tentang kontestasi dalam konteks pendidikan secara umum, dan secara khusus tentang kontestasi lembaga pendidikan Islam yang berkaitan dengan isu pertumbuhan lembaga pendidikan Islam , keragaman lembaga pendidikan Islam dan persaingan lembaga pendidikan Islam. *Kedua*, penelitian dan publikasi tentang adaptasi dalam konteks pendidikan secara umum dan secara khusus tentang adaptasi lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi berbagai perubahan dalam lingkungannya terutama berkaitan dengan adaptasi sistem lembaga pendidikan Islam baik sistem pembelajaran maupun sistem lembaganya.

Pertama, penelitian dan publikasi tentang kontestasi dalam konteks pendidikan secara umum, dan secara khusus tentang kontestasi lembaga pendidikan Islam yang berkaitan dengan isu pertumbuhan lembaga pendidikan Islam , keragaman lembaga pendidikan Islam dan persaingan lembaga pendidikan Islam, sebagai berikut: Pembicaraan tentang kontestasi dalam pendidikan dalam dunia global meliputi kontestasi politik dalam dunia pendidikan, kontestasi sebagai kompetisi antara sekolah-sekolah, dan kontestasi antara siswa dalam sekolah. Kontestasi terkait dengan posisi sekolah dalam pasar pendidikan. Hasil penelitian dan publikasi oleh Tina Vukasovič yang berjudul *Managing Consumer-Based Brand Equity in Higher*

Education yang dimuat dalam jurnal *Managing Global Transitation* 13, no. 1 tahun 2015, menurutnya dengan menciptakan dan mengelola *brand* yang kuat membuat sebuah perguruan tinggi dapat memainkan peran yang penting dalam pasar perguruan tinggi.[65] Elena Avdarova mengidentifikasi *knots of contestation* dari adanya perubahan pada sistem pendidikan lokal akibat dari transformasi global dalam sistem pendidikan modern di UEA yaitu pada tujuan pendidikan, tindakan, subjek, dan bahasa.[66] Paolo et al mengemukakan tentang *servitization* sebagai praktik kontestasi dalam bisnis.[67] Penelitian tersebut memberikan deskripsi tentang praktik kontestasi melalui pelayanan terhadap konsumen. Walaupun bukan dari disiplin ilmu yang sama, namun penelitian ini berkontribusi dalam hal justifikasi tentang praktik dan model kontestasi dalam pelayanan serta dalam hal metode penelitian. Daniel Dietrich dan Cristel Antonia Russell dalam *A Framework of Brand Contestation: Toward Brand Antifragility* mengemukakan konsep *antifragility* (antikerapuhan) yang diperoleh dari kontestasi *brand* dalam lingkungan pasar (*marketplace*) tergantung dari kemampuan menjawab berbagai gangguan, bernegosiasi, dan memahami ekspresi *customer*.[68]

---

[65] Tina Vukasovič, "Managing Consumer-Based Brand Equity In Higher Education." Managing Global Transitation 13, No. 1 (2015), h. 87.

[66] Elena Aydarova, "Discursive Contestations and Pluriversal Futures: A Decolonial Analysis of Educational Policies in the United Arab Emirates," *Education Policy Analysis Archives* 25, no. 111 (November 6, 2017), h. 7. *Knots of Contestation* (simpul-silmpul kontestasi) yang dimaksudkan oleh Elena Aydarova yakni bidang-bidang di mana kelompok-kelompok yang berbeda menyajikan perspektif yang berlawanan.

[67] Teea Palo, Maria Åkesson, dan Nina Löfberg, "Servitization as Business Model Contestation: A Practice Approach," *Journal of Business Research* 104 (November 2019): 486–496.

[68] Daniel Dietrich dan Cristel Antonia Russell, "A Framework of Brand Contestation: Toward Brand Antifragility," ed. Linda L. Price, *Journal of Consumer Research* 48, no. 4 (September 14, 2021): 682–708 (dalam laporan penelitian yang dibaca oleh peneliti yang dipublikasikan pada Marketing Science Institute Working Paper Series 2021, Report No. 21-141, h. 47-48.

Pembahasan kontestasi lembaga pendidikan di Indonesia berkisar tentang kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, juga persaingan antara lembaga pendidikan Islam yang berbeda latar belakang ideologi keagamaan. *Sekolah Publik VS Sekolah Privat*, buku ini merupakan disertasi yang dibukukan, disertasi Nanang Martono di Universitě Lumiěre de Lyon 2 Perancis pada tahun 2017, yang berjudul *La Politique D'assurance de la Qualité au Lycée en Indonésie : Le Système D'accréditation, La Perception du Public, et La Competition.*[69] Studi ini membahas penerapan sistem penjaminan kualitas di sekolah menengah di era Reformasi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, persaingan antar sekolah muncul disebabkan karena mereka tidak memiliki tingkat kualitas yang sama. Selain itu, Salah satu yang menarik dalam penelitian ialah sorotan yang tajam pada perbedaan persepsi tentang sekolah yang berkualitas berdasarkan berbagai sudut pandang para aktor (pemerintah, sekolah, pengguna). *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*, oleh Karel Steenbrink.[70] Buku ini merupakan disertasi yang diterbitkan. Karel A Steenbrink menjelaskan bahwa pesantren melakukan konvergensi dan adaptasi terhadap sistem pendidikan barat yang diperkenalkan oleh penjajah Belanda, adapun madrasah menurutnya terbentuk karena respon terhadap pesatnya perkembangan sekolah Belanda. *Pesantren, Sekolah, dan Madrasah (Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam)*. Ini merupakan

[69] Nanang Martono, *Sekolah Publik Vs Sekolah Privat: Dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, Dan Liberalisasi Pendidikan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, N.D.). h. 14.

[70] Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial, 1986), h. 219-221.

disertasi yang ditulis oleh Haidar Putra Daulay untuk gelar doktor dalam ilmu Pendidikan Islam di IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga) pada tahun 1991. Penelitian tersebut melihat tentang kurikulum yang dilaksanakan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam; pesantren, sekolah, dan madrasah. Menurutnya, masing-masing lembaga tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan bila ditinjau dari sudut kurikulum pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam yang diharapkan adalah yang dapat merealisir konsep kurikulum pendidikan Islami, dan konsep idealisasi tenaga pendidik.[71]

Lembaga pendidikan Islam di Indonesia abad 20: *Pergumulan antara Modernitas dan Identitas oleh Arief Subhan*.[72] Buku ini merupakan disertasi Arief Subhan di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Arief Subhan menyajikan geneologi madrasah, pesantren dan sekolah Islam, dan juga menggambarkan sejarah perkembangan dan perubahan (*Continuity and Change*) lembaga pendidikan Islam, bagaimana lembaga pendidikan itu berinteraksi dengan modernitas termasuk kebijakan negara sambil pada saat yang sama mempertahankan dan memelihara identitasnya. Penelitian Arief Subhan (2012) terlihat relevan dengan penelitian disertasi ini mencakup kontestasi dan adaptasi lembaga pendidikan Islam. Meskipun ia menyajikan gambaran tentang pergumulan antara modernisasi dan identitas yang menghasilkan bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam yang bervariasi tetapi belum secara jelas mengekplorasi fenomena yang terjadi jika lembaga-lembaga pendidikan

[71] Haidar Putra Daulay, *Pesantren, Sekolah, dan Madrasah (Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam)*, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1991, h. xix.

[72] Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012).

Islam tersebut hadir dalam suatu lingkungan yang sama. Variasi dan corak lembaga pendidikan Islam dalam suatu lingkungan yang sama memberikan kesempatan masyarakat untuk menentukan pilihannya di antara banyak pilihan. *Ideologi Keagamaan dalam Pendidikan : Diseminasi dan Kontestasi pada Madrasah dan Sekolah Islam di Lombok* karya ini merupakan disertasi yang dipublikasikan. Saparudin mengupas bagaimana ideologi keagamaan didiseminasikan, dan implikasinya terhadap kontestasi pembentukan identitas ideologis pada madrasah dan Sekolah Islam di Lombok.[73] *Ideologi, Transnasionalisme, dan Jaringan Lembaga Pendidikan Islam: Kontestasi LIPIA dan STFI Sadra di Indonesia* oleh Ali Muhtarom. Hampir sama dengan karya Saparudin, pembahasan tentang kontestasi ideologi keagamaan dalam wadah lembaga pendidikan Islam, tetapi karya Ali Muhtarom ini lebih menarik karena dikaitkan dengan geopolitik secara global. Buku yang diterbitkan dari penelitian disertasi ini menjelaskan bahwa dilihat dari afiliasi keormasan dan bentuk ideologinya, lembaga pendidikan Islam di Indonesia terkotak-kotakkan pada NU, Muhammadiyah, Persis, Wahdah Islamiyah, Al Irsyad, Salafi, Tablighi, dan juga Syi'ah. Ali Muhtarom memfokuskan pada kontestasi antara 2 aliran transnasionalisme yakni kelompok Salafi dan kelompok Syi'ah di Indonesia dalam arena lembaga pendidikan Islam. LIPIA mewakili kelompok Salafi dan STFI

[73] Saparudin Saparudin, *Ideologi Keagamaan dalam Pendidikan : Diseminasi dan Kontestasi pada Madrasah dan Sekolah Islam di Lombok* (Jakarta: Onglam Books, 2017), h. 23. Proses diseminasi yang dimaksudkan oleh Saparudin dibatasi pada aspek kurikulum (intra, ekstra, dan *hidden*), buku teks, dan bahan ajar keislaman, lembaga kesiswaan, guru, pimpinan sekolah dan kelompok keagamaan, regulasi internal, dan lingkungan pendidikan dan sosial yang mendukung ideology tersebut.

mewakili kelompok Syi'ah.[74] Ali Muhtarom (2018) menjelaskan bahwa terjadi kontestasi antara dua lembaga pendidikan Islam, yang dalam level yang sama (perguruan tinggi), yang sama-sama berada di Jakarta, yaitu LIPIA, dan STIF Sadra, yang mewakili dua paham keagamaan yang berbeda. LIPIA merepresentasikan paham salafi dan STIF Sadra merepresentasikan paham Syi'ah. Ali Muhtarom dalam menjelaskan kontestasi dengan menggunakan teori modal sosial Piere Bourdieau. Selain itu, penelitian Ali Muhtarom memberikan argumen bahwa paham keagamaan yang berbeda antara lembaga pendidikan Islam dapat menimbulkan kontestasi di antara lembaga pendidikan tersebut. Penelitian yang paling belakangan dari Ihsan et al yang berjudul *The Contestation of National and Religious Curricula in Indonesia's Madrasas since the Passage of the Uuspn*, artikel ini menunjukkan adanya kontestasi antara agama dan kurikulum nasional. Kontestasi dalam penelitian tersebut difokuskan pada madrasah dalam hal kurikulumnya. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa madrasah harus bertindak secara dinamis, untuk merespons masyarakat yang selalu berubah.[75]

Kedua, penelitian dan publikasi tentang adaptasi dalam konteks pendidikan global secara umum dan secara khusus tentang adaptasi lembaga pendidikan Islam dalam isu pendidikan menghadapi berbagai perubahan dalam lingkungannya terutama berkaitan dengan adaptasi sistem lembaga pendidikan baik sistem pembelajaran maupun sistem

[74]Ali Muhtarom, *Ideologi, Transnasionalisme, Dan Jaringan Lembaga Pendidikan Islam: Kontestasi LIPIA Dan STFI Sadra Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN SUKA Press, 2018).

[75] Ihsan Ihsan et al., "The Contestation of National and Religious Curricula in Indonesia's Madrasas since the Passage of the Uuspn," *Educational Studies* (July 28, 2021): 1–14.

lembaganya. Pembicaraan tentang adaptasi dalam bidang pendidikan secara global, meliputi adaptasi pendidikan terhadap perubahan iklim, adaptasi pendidikan terhadap perkembangan IT, adaptasi pendidikan konvensional untuk pendidikan khusus dan adaptasi siswa sebagai individu menghadapi lingkungannya.[76] Karya pertama tentang adaptasi dalam lembaga pendidikan adalah karya Kim S Cameron yang berjudul *Organizational adaptation and higher education* yang terbit pada tahun 1984. Cameron berpendapat bahwa [77]Karya dari Barbara Sporn yang berjudul *Adaptive University Structures: An Analysis of Adaptation to Socioeconomic Environments of US and European Universities*. Studi Sporn berfokus pada kelembagaan, meliputi tata kelola, manajemen, dan kepemimpinan. Sporn menganalisis adaptasi dalam pengaturan kelembagaan yang berbeda-beda, dengan itu Ia mengembangkan proposisi untuk teori adaptasi pada lembaga pendidikan tinggi.[78] Karya lainnya yaitu disertasi dari Shawn Michael Brown, yang berjudul *Organizational Adaptation to the Rapidly Changing External Environment: A Case Study of Strategic Marketing at Notre Dame College in Ohio*[79] *menjelaskan* bahwa terdapat keterkaitan antara perubahan lingkungan dengan perubahan dan strategi pemasaran pada suatu organisasi pendidikan

[76] Roberta Nannucci, *Uprooting and Surviving: Adaptation and Resettlement of Migrant Families and Children* (Springer Science & Business Media, 2012). h. 6.

[77] Cameron, "Organizational Adaptation and Higher Education."

[78] Barbara Sporn, *Adaptive University Structures: An Analysis of Adaptation to Socioeconomic Environments of US and European Universities* (J. Kingsley Publishers, 1999), h. 6.

[79] Shawn Michael Brown, "Organizational Adaptation to the Rapidly Changing External Environment: A Case Study of Strategic Marketing at Notre Dame College in Ohio." (2012).

Adapun yang berkaitan langsung dengan adaptasi lembaga pendidikan Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian dan publikasi di Indonesia. Sebagian besar penelitian dan publikasi berisi tentang respon lembaga pendidkan Islam terhadap perubahan sosial. Perubahan terjadi pada sistem lembaga pendidikan Islam, baik sistem pembelajaran maupun sistem lembaganya.

Education Unit Transformation for Maintain Its Existence in Islamic Boarding School (Multi-case Study on Tebuireng Islamic Boarding School, Gading Islamic Boarding School Malang, and Sidogiri Islamic Boarding School Pasuruan)[80]oleh M. Busyairi. Jurnal ini merupakan publikasi dari penelitian disertasi penulisnya yang berjudul Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Pondok Pesantren dalam Mempertahankan Eksistensi (Studi Multikasus pada Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pondok Pesantren Gading Malang, dan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan) yang diujikan pada tahun 2010 di Program Pascasarjana Universitas Malang Program Studi Manajemen Pendidikan.

Pendidikan Multikultural sebagai Strategi Adaptasi Pesantren Bali Bina Insani di Daerah Minoritas Muslim Tabanan Bali oleh Muhammad Fahmi.[81] Muhammad Fahmi melihat bahwa pendidikan multikultural tersebut merupakan strategi adaptasi kelompok minoritas di tengah-tengah kelompok mayoritas yang berbeda paham dan

[80] M. Busyairi AS, "Education Unit Transformation for Maintain Its Existence in Islamic Boarding School (Multi-Case Study on Tebuireng Islamic Boarding School, Gading Islamic Boarding School Malang, and Sidogiri Islamic Boarding School Pasuruan).," *Journal of Education and Practice* 8, no. 5 (2017): 56–64.

[81] Muhammad Fahmi, "Pendidikan Multikultural sebagai Strategi Adaptasi Pesantren Bali Bina Insani di Daerah Minoritas Muslim Tabanan Bali" (Disertasi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/39724/.

ajaran. Ia menggunakan analisis AGIL[82] oleh Talcott Parson sebagai alat analisis kontribusi pendidikan multikultural dalam tatanan sistem sosial.

Ketahanan Madrasah di Daerah Rentan Konflik (Studi pada Madrasah Pendai Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Kalimantan Barat) oleh Sukino.[83] Buku ini adalah disertasi yang diterbitkan. Sukino menjelaskan tentang adaptasi madrasah di daerah minoritas muslim dan sekaligus rentan konflik. Ketahanan madrasah sehingga terbukti dapat menunjukkan eksistensinya dan dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lain di Kecamatan Mandor. Penelitian ini menggunakan analisis teori sistem AGIL Talcot Parson yang dielaborasi dengan teori modal sosial Pieree Bourdieu dan teori Manajemen Berbasis Sekolah.

Penelitian oleh Azyumardi Azra berjudul *Surau: Pendidikan Islam Tradisi dalam Transisi dan Modernisasi*.[84]Buku ini menjelaskan bahwa perkembangan politik, ekonomi, dan pendidikan di minang Kabau menimbulkan perubahan-perubahan hebat dalam kehidupan sosial masyarakat, dan perubahan tersebut berdampak pula terhadap insitusi-institusi dan pranata sosial di Minang Kabau. Surau vs Pendidikan Sekuler dan Surau Vs Pesantren merupakan subbab dalam buku ini yang menjelaskan tentang. Banyak surau ditutup atau menciut fungsinya menjadi sekedar tempat mengaji Al

---

[82] AGIL (Adaptation, Goal, Integration, Latency). Teori Ini Dikemukakan Oleh Talcott Parson. Menurutnya Keempat Sistem tersebut ditemukan di dalam seluruh sistem baik sistem ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

[83] Sukino, *Ketahanan Madrasah Di Daerah Rentan Konflik* (*Studi Pada Madrasah PENDAI Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Kalimantan Barat*) (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2018).

[84] Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisi Dalam Transisi Dan Modernisasi* (Kencana, 2017). h. xxviii. Terdapat Versi Inggrisnya *The Rise And The Decline Of The Minangkabau Surau A Traditional Islamic Educational Institution In West Sumatra During The Dutchcolonial Government* Tahun 2007 ini Merupakan Thesis MA di Columbia University pada tahun 1988.

Qur'an. Sebagian surau lagi untuk meneruskan kelangsungan hidupnya terpaksa berafiliasi dengan organisasi Islam tertentu yang menyelenggarakan pendidikan Islam. Dikatakan bahwa karena kelambanan surau dalam beradaptasi dengan modernisasi pendidikan menjadikannya kehilangan peminat dan selanjutnya kehilangan peran pentingnya sebagai lembaga pendidikan Islam.

Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya oleh Maksum.[85] Buku ini merupakan disertasi yang diterbitkan. Maksum berpendapat, bahwa pada era modern madrasah masih tetap hidup. Namun demikian, eksistensinya dipertanyakan ketika kurikulumnya masih dimonopoli oleh *ulŭm al-naqliyah*. Kurikulum madrasah yang membatasi diri pada ilmu-ilmu agama agaknya mengancam eksistensinya sendiri. Meskipun demikian, jika dilakukan penyesuaian dengan kecenderungan pendidikan modern madrasah masih tetap dituntut untuk menampilkan cirinya sendiri yang memperhatikan ilmu-ilmu agama secara lebih proporsional. Sikap madrasah yang terlalu konservatif akan mendorong lembaga itu terasing dan bahkan lenyap dari perkembangan modern. Sebaliknya, sikap akomodatif yang berlebihan terhadap kecenderungan pendidikan modern, akan menjerumuskan madrasah ke dalam sistem yang lepas dari nilai-nilai keislaman.

Dinamika Kelembagaan Pondok Pesantren: Perubahan dan Modernisasi Pendidikan Islam oleh Riduwan.[86] Karya ini merupakan publikasi dari hasil penelitian disertasi yang berjudul *Respon Pengelola Pondok Pesantren Salafiyah terhadap*

[85] Maksum, *Madrasah: Sejarah*…, h. viii.
[86] Riduwan, *Dinamika Kelembagaan Pondok Pesantren: Perubahan dan Modernisasi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h. x.

Modernisasi Pendidikan (Studi Realitas Sosial di Pondok Pesantren Miftahul Mubtadi'in). Penulisnya menulis disertasi ini untuk memperoleh gelar doktor di bidang ilmu sosial di Universitas Merdeka Malang. Riduwan berpendapat bahwa pengembangan kelembagaan di pesantren salafiyah dilakukan dengan melahirkan lembaga baru dan lembaga pendukung sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Tetapi, lembaga pendirian awal berupa madrasah diniyah salafiyah dan kajian kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren salafiyah sebagai pondasi tetap bertahan. Bahkan, secara teknik, lembaga baru yang muncul berusaha ditarik dan dipadu dengan warna tradisi pesantren salafiyah. Sehingga lembaga baru tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga pendidikan atau sekolah di luar pesantren. Karakter yang berbeda inilah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat.[87] Teori yang digunakan sebagai alat analisis yaitu teori perubahan sosial Anthony Giddens.

Sistem Pendidikan Pesantren di Kalimantan Selatan oleh H. Husnul Yaqin. Buku ini merupakan disertasi yang diterbitkan. Menurut beliau, sistem pendidikan pesantren di Kalimantan Selatan terbuka terhadap perkembangan sistem pendidikan di luar dirinya dan terhadap berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan tanpa kehilangan identitas esensialnya sebagai lembaga *Tafaqquh fî al dîn*.[88] Buku ini banyak memberikan gambaran berbagai inovasi yang dilakukan pesantren sebagai bentuk penyesuaian dirinya terhadap lingkungan. Analisis manajemen pendidikan

[87] Riduwan, *Dinamika Kelembagaan Pondok Pesantren: Perubahan dan Modernisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2019), h. xiii.

[88] Husnul Yaqin, *Sistem Pendidikan Pesantren di Kalimantan Selatan*, Cet II (Banjarmasin: Antasari Press, 2010), h. 253.

lembaga pesantren diuraikan dengan terperinci, meliputi bidang pengajaran, bidang kesantrian, bidang personalia, bidang keuangan, serta bidang hubungan pesantren dan masyarakat.

Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah tentang Modernisasi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren Ibnul Amin, Al Mursyidul Amin, dan Yasin di Kalimantan Selatan).[89] Disertasi ini menjelaskan pandangan pimpinan pondok pesantren salafiyah di Kalimantan Selatan mengenai pentingnya melakukan penyesuaian diri dengan perkembangan zaman. Aspek-aspek yang perlu dimodernisasi adalah pada bidang kurikulum, bidang pembelajaran, bidang evaluasi, dan manajemen pondok pesantren. Karya ini dinilai belum memadai untuk menjelaskan adaptasi terhadap tantangan yang dihadapi lembaga pondok pesantren salafiyah masa sekarang ini. Karena tidak lagi modernisasi yang menjadi tantangan utama, melainkan pembentukan citra atau branding pondok pesantren salafiyah agar terlepas dari citra "*outmoded*" ketinggalan mode. Untuk itu, diperlukan adaptasi, bukan hanya terhadap modernisasi tetapi adaptasi untuk membentuk branding pondok itu sendiri di masyarakat.

Penelitian dan publikasi yang ditulis terkait dengan lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Tabalong masih sangat terbatas. Berdasarkan hasil penelusuran online, ditemukan 2 disertasi yang mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Tabalong, yaitu penelitian disertasi *Adaptasi Bekantan (Nasalis Larvatus Wurmb) tehadap*

[89] Hilmi Mizani, *Pandangan Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah tentang Modernisasi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren Ibnul Amin, Al Mursyidul Amin, dan Yasin di Kalimantan Selatan)*, Disertasi PPs UIN Antasari Banjarmasin, 2016.

Hutan Karet: Studi Kasus di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan oleh Mochamad Arief Soendjoto, Sekolah Pascasarjana IPB (Institut Pertanian Bogor) pada tahun 2005 dan penelitian disertasi oleh Ahmad Juhaidi yang berjudul *Program CSR Pendidikan Perusahaan Pertambangan Batubara (Telaah Kritis terhadap Distribusi dan Alokasi Dana CSR Pendidikan PT Adaro Indonesia untuk Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Balangan dan Tabalong Kalimantan Selatan)* pada tahun 2012.[90] Peneltian ini dilakukan untuk mengetahui tentang distribusi dan alokasi dana CSR pendidikan PT Adaro Indonesia untuk sekolah/madrasah di sekitar wilayah tambang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dan alokasi lebih banyak kepada lembaga yang bukan sekolah/madrasah, sehingga terlihat bahwa program CSR pendidikan belum konsisten terhadap kualitas pendidikan di sekolah/madrasah, namun, di samping itu, program CSR memiliki dampak positif bagi sekolah/madrasah terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana. dengan memperhatikan sejumlah hasil penelitian dan publikasi di atas, peneliti melihat bahwa penelitian yang mengelaborasi lembaga pendidikan Islam baik pesantren, madrasah, maupun sekolah Islam dilihat sebagai sistem terbuka yang berada dalam sistem sosial atau sistem masyarakat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan penelitian tentang lembaga pendidikan Islam yang dikaji secara parsial, misalnya kajian tentang pesantren saja, atau tentang madrasah saja, tentang Sekolah Islam atau perguruan

[90] Ahmad Juhaidi, "Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibilty (CSR) Pendidikan Dari Perusahaan Pertambangan Batu Bara (Studi Tentang Pengelolaan Dana CSR Pendidikan Untuk Sekolah Dan Madrasah Sekitar Area Tambang Batu Bara PT Adaro Indonesia Di Kabupaten Balangan Dan Tabalong Kalimantan Selatan)," Disertasi, diakses pada tanggal 21 Mei 2019, Http://Idr.Uin-Antasari.Ac.Id/45/.

tinggi Islam saja. Substansi masalah dari penelitian-penelitian tersebut sebagian besar tentang sistem manajemen pendidikan di lembaga pendidikan Islam, termasuk kurikulum lembaga pendidikan Islam, baik itu kurikulum pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Karya yang lengkap tentang sistem pendidikan misalnya meliputi kurikulum, proses pembelajaran, dan manajemen pendidikan ialah karya Husnul Yaqin, tetapi karya ini membatasi kajiannya pada pesantren saja.

Penelitian Nanang Martono (2017) dan Ali Muhtarom (2018) ada sedikit kaitan dengan penelitian disertasi ini dalam hal fokus masalah kontestasi lembaga pendidikan Islam. Penelitian disertasi Nanang Martono (2017) setidaknya memiliki perbedaan dalam dua hal. *Pertama*, Nanang Martono tidak mengupas secara tuntas tentang kontestasi lembaga pendidikan Islam, hanya dibahas secara parsial saja menjadi bagian kecil dalam disertasinya. *Kedua*, basis teori yang digunakan berbeda, Nanang Martono menggunakan teori modal sosial oleh Pieree Bourdiaue untuk alat analisis persaingan sekolah negeri dan sekolah swasta.

Penelitian yang paling dekat dengan penelitian ini jika dilihat dari fokus kontestasi dan adaptasi sebuah lembaga pendidikan dalam berorientasi pasar pendidikan ialah karya Barbara Sporn (1999). Sporn juga merekomendasikan di bagian penutup bukunya, untuk penelitian yang akan datang masih perlu dikaji tentang adaptasi kelembagaan dalam pengaruh lingkungan, tipe institusi, organisasi jaringan, serta perkembangan manajemen administrasi lembaga.[91] Peneliti bermaksud

[91] Barbara Sporn, *Adaptive University Structures: An Analysis of Adaptation to Socioeconomic Environments of US and European Universities* (J. Kingsley Publishers, 1999), h. 289.

menjawab tantangan tersebut, walaupun demikian, penelitian ini tentu sangat berbeda, sebab perbedaan konteks ruang dan waktu penelitian serta perkembangan pesat teknologi IT yang terjadi sebagai salah satu latar belakang penelitian ini, tentu saja akan menghasilkan temuan penelitian yang berbeda pula.

Penelitian adaptasi lembaga pendidikan Islam selain penelitian Arief Subhan (2012) adalah penelitian Sukino (2018). Sukino menjelaskan tentang ketahanan madrasah di daerah rentan konflik. Teori yang digunakannya adalah teori *education production function* menganalisis tentang input-output madrasah. Adaptasi madrasah juga dibahas tetapi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pada adaptasi madrasah itu dilakukan, disini sukino menjelaskan adaptasi dengan menggunakan teori Robert K Merton.

Penelitian dan publikasi di atas menunjukkan bahwa cukup banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang kontestasi dan adaptasi lembaga pendidikan Islam, walaupun beberapa diantaranya tidak secara spesifik menjelaskan kontestasi apa yang dimaksudkan, seakan-akan kontestasi itu sudah jelas dengan sendirinya. Kebanyakan penelitian tersebut menggunakan perspektif teori konflik dalam menjelaskan kontestasi lembaga pendidikan Islam, pada penelitian ini, penulis ingin memberikan perspektif teori fungsional untuk menjelaskan tentang kontestasi tersebut. Penulis berpendapat bahwa kontestasi tidak selalu berkaitan dengan persaingan, sehingga penulis melihat dasar kontestasi dalam perspektif fungsional merupakan keikutsertaan lembaga dan perannya dalam proses pendidikan Islam yang ada di masyarakat.

Adaptasi lembaga pendidikan Islam dalam bentuk ketahanan madrasah terhadap tantangan lingkungan dijelaskan oleh Sukino dengan analisis teori sistem struktural fungsional Talcott Parson dan Robert K Merton. Sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan teori adaptasi yaitu penyesuaian lembaga pendidikan Islam terhadap perubahan, bukan hanya terhadap modernisasi tetapi lebih terfokus penyesuaian pada orientasi pasar pendidikan. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas.

Selain itu, penelitian-penelitian tersebut jika dikaitkan dengan lokasi penelitian, masih belum ada penelitian yang memadai untuk menjelaskan tentang lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong. Penulis bermaksud menggunakan pendekatan sosiologi agar dapat melihat lebih jauh, bagaimana kontestasi dan adaptasi sosial yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam dalam lingkungan dan sistem masyarakat di Kabupaten Tabalong.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam disertasi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi kajian teori dan kerangka pemikiran. Kajian teoritis meliputi teori kontestasi, teori pemasaran pendidikan, teori *brand equity* dan teori adaptasi dalam konteks pendidikan. Adapun kerangka pemikiran berisi tentang kerangka pikir atau penjelasan sementara atas fenomena-fenomena yang akan diteliti

oleh peneliti.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, analisis dan interpretasi data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Potret Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong. Pada bagian ini berisi gambaran tentang Kabupaten Tabalong yang merupakan lokasi penelitian, terdiri dari beberapa bagian yaitu selayang pandang Kabupaten Tabalong dalam sejarah, politik, geografis, dan sosiologis. Selanjutnya potret lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Islam meliputi potret madrasah, potret pesantren dan potret Sekolah Islam. Bab ini bermaksud menyajikan konstelasi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tabalong terhadap lembaga pendidikan Islam.

BAB V Kontestasi Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Bagian ini berisi paparan data beserta analisis yang disajikan dalam beberapa subbab yaitu subbab *pertama* memahami kontestasi lembaga pendidikan Islam, Subbab kedua tentang kontestasi madrasah, kontestasi pesantren, dan kontestasi Sekolah Islam. Subbab ketiga mendiskusikan lebi lanjut hasil temuan tentang kontestasi dengan teori yang sudah ada.

BAB VI Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Bagian ini berisi paparan data beserta analisis data yang disajikan dalam beberapa subbab yaitu subbab *pertama* memahami adaptasi lembaga pendidikan Islam, Subbab kedua paparan data beserta analisis tentang adaptasi lembaga pendidikan Islam yaitu adaptasi madrasah, adaptasi pesantren, dan adaptasi

Sekolah Islam. Subbab ketiga mendiskusikan lebih lanjut hasil temuan tentang adaptasi lembaga pendidikan Islam dengan teori yang sudah ada.

BAB VII Penutup, berisi simpulan dan rekomendasi.